

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan hal tersebut sudah dirasakan oleh berbagai pihak. Teknologi informasi sendiri adalah istilah yang diberikan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi seperti peralatan, sistem ataupun metode yang digunakan untuk memproses dan mengolah suatu data untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu (Asmawi, Syafei, & Yamin, 2019). Dengan perkembangan teknologi yang sudah ada saat ini, memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan inovasi dalam pemberian pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, SPBE adalah implementasi perkembangan teknologi informasi serta komunikasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengguna SPBE dan Pemerintah Indonesia telah mewajibkan seluruh instansi pemerintah daerah maupun pusat yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan SPBE sebagai bentuk integrasi *e-government* (Astuti, Sukarsa, & Raharja, 2021). Sesuai dengan isi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018, pemanfaatan SPBE dalam instansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam pertukaran keuangan dan informasi di dalam pemerintah (Arief & Abbas, 2021).

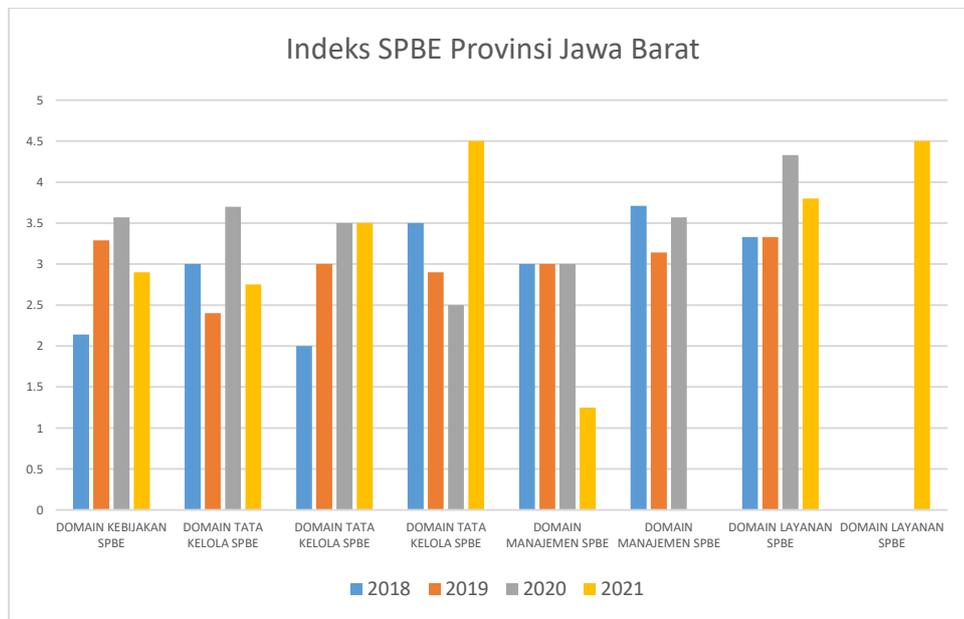
Dalam pelaksanaannya, SPBE menghasilkan nilai indeks yang dihasilkan oleh proses evaluasi SPBE. Berdasarkan isi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020, proses evaluasi tersebut merupakan proses penilaian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan SPBE pada suatu daerah dan memberikan penilaian mandiri berdasarkan informasi yang telah didapatkan dimana di akhir proses tersebut akan menghasilkan nilai indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan atau *maturity level* dari SPBE di suatu instansi pemerintah daerah maupun pusat Nilai indeks yang dihasilkan juga dapat memberikan gambaran bagi instansi tersebut untuk melakukan peningkatan

kualitas dalam penerapan SPBE serta pelayanan kepada publik di daerah masing-masing. Berikut adalah nilai indeks yang digunakan untuk mengukur Kematangan suatu SPBE dan dikategorikan berdasarkan predikat.

Tabel I-1 Nilai Indeks Evaluasi SPBE

Nilai Indeks	Predikat
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 - < 4,2	Sangat Baik
2,6 - < 3,5	Baik
1,8 - < 2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari *website* opendata.jabarprov.go.id, nilai indeks SPBE provinsi Jawa Barat menunjukkan nilai sebesar 3,28 sehingga predikat untuk pelaksanaan SPBE pada provinsi Jawa Barat merupakan baik. Hal tersebut belum sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu mendapatkan nilai indeks pelaksanaan SPBE dengan predikat sangat baik. Melalui *website* opendata.jabarprov.go.id tahun 2022 ditemukan juga bahwa nilai indeks SPBE Pemerintah Jawa Barat mengalami penurunan pada beberapa kategori dari tahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi bisa dilihat lebih jelas melalui gambar berikut.



Gambar I.1 Grafik Indeks SPBE Jawa Barat

Berdasarkan Gambar I.1 Grafik Indeks SPBE Jawa Barat, domain Kebijakan SPBE, domain Tata Kelola SPBE, domain Manajemen SPBE serta domain Layanan SPBE terjadi penurunan. Oleh karena itu, pelaksanaan SPBE di provinsi Jawa Barat belum mencapai indeks “sangat baik”.

Salah satu instansi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang ikut dalam pelaksanaan SPBE adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Berdasarkan laporan mengenai evaluasi SPBE tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat mencacu kepada PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, didapatkan hasil nilai indeks berikut.

Tabel I-2 Indeks Nilai SPBE Provinsi Jawa Barat

Tahun		2021
Nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat		3.28
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	2.90
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2.90
Domain 2	Tata Kelola SPBE	3.40
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	2.75
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.50
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	4.50
Domain 3	Manajemen SPBE	1.18
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	1.25
Aspek 6	Audit TIK	1.00
Domain 4	Layanan SPBE	4.08
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.80
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.50

Melihat dari tabel Tabel I-2, pelaksanaan SPBE pada Provinsi Jawa Barat masih belum mencapai predikat “Sangat Baik” dengan nilai 3.28 sehingga diperlukan peningkatan terhadap nilai indeks SPBE. Kemudian, domain 2.2 berupa Tata

Kelola SPBE dengan aspek Perencanaan Strategis SPBE masih mendapatkan nilai 2.75 dengan predikat “Baik” dan masih jauh dari predikat “Sangat Baik”. Domain 4.7 yang merupakan Layanan SPBE dengan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik mendapatkan nilai 3.80 dengan predikat “Sangat Baik” dan dengan usulan yang sesuai, dapat ditingkatkan hingga mendapatkan predikat “Memuaskan”

Sebagai upaya dalam peningkatan nilai indeks, BAPENDA menetapkan dua nilai sasaran, yaitu Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Dua sasaran tersebut kemudian memiliki dua indikator keberhasilan, yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA. Dari dua indikator tersebut, BAPENDA akan menyusun proses bisnis yang terintegrasi antar empat bidang yang ada di BAPENDA, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pengelolaan Pendapatan, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, serta Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan.

Keempat bidang tersebut akan memiliki program dan kegiatan yang dibuat untuk menyelesaikan berbagai isu yang dimiliki oleh BAPENDA untuk meningkatkan nilai indeks SPBE Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang didapatkan dari Rencana Kerja (Renstra) BAPENDA, beberapa isu strategis yang sedang dihadapi oleh BAPENDA adalah sebagai berikut.

1. Tingkat ketaatan Wajib Pajak yang memiliki Kendaraan Bermotor masih rendah
2. Masyarakat masih dominan menggunakan media samsat induk untuk pembayaran pajak
3. Layanan e-samsat belum sepenuhnya secara elektronik (pengesahan harus kembali ke Samsat)
4. Kendaraan Listrik
5. Tingkat Daya Beli akan mempengaruhi Minat Beli Kendaraan Baru
6. Volume Industri Kendaraan Berkurang

7. Banyaknya badan usaha pemegang ijin niaga umum BBM yang melakukan penjualan BBM di wilayah Jabar tetapi belum terdaftar sebagai wajib pungut di Jawa Barat
8. Efektivitas penerapan harga dasar air terbaru
9. Banyaknya wajib pajak yang terkendala oleh penerbitan SIPPA
10. Akurasi jumlah penduduk yang akan menentukan besaran Pajak Rokok

Seluruh unit kerja yang ada di BAPENDA Provinsi Jawa Barat akan saling koordinasi dan bekerja sama dalam menangani isu strategis tersebut. Salah satu unit kerja yang ada di BAPENDA adalah Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 174 Tahun 2021, tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan adalah menyelenggarakan pengelolaan Infrastruktur dan Tata kelola, meliputi perencanaan dan pengembangan Infrastruktur TIK dan jaringan komunikasi, pengembangan sumber daya penyusunan TIK, Renstra TIK dan Penyusunan Proses Bisnis TIK. Sehingga, pemetaan peta proses bisnis dengan layanan, aplikasi dan data pendukung lainnya dapat membantu Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan dalam mencapai tujuan dari tugas tersebut. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan sendiri memiliki nilai kesenjangan dimana realisasi belum dapat memenuhi indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan proses bisnisnya. Kesenjangan tersebut terjadi dalam proses bisnis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 pada yang melanda Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka diperlukannya pemetaan proses bisnis yang dapat menyelaraskan proses bisnis dengan layanan serta aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dapat meningkatkan nilai indeks SPBE Provinsi Jawa Barat serta menyelesaikan isu-isu yang dialami oleh Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan. Dengan dilakukannya perancangan arsitektur EA, maka bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan dapat memberikan kontribusi kepada BAPENDA secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan serta penyelesaian isu-isu tidak tercapainya nilai indikator

pelaksanaan proses bisnis. Kontribusi yang diberikan tersebut nantinya akan berfokus kepada usaha dalam meningkatkan nilai indeks SPBE BAPENDA Provinsi Jawa Barat, terutama pada domain 2.2 yang membahas mengenai Perencanaan Strategis SPBE dan domain 4.7 terkait Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Oleh karena itu, penelitian kali ini akan berfokus kepada perancangan Arsitektur *Enterprise Architecture* menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi sebagai upaya untuk meningkatkan nilai indeks SPBE pada domain dua aspek dua “Perencanaan Strategis SPBE” dan domain empat aspek tujuh “Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah untuk penelitian kali ini adalah

1. Bagaimana analisis dan perancangan *enterprise architecture* pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan?
2. Bagaimana perancangan *IT Roadmap* pada Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Melakukan perancangan *blueprint enterprise architecture* untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM
2. Melakukan perancangan *IT Roadmap* untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan

I.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian dilakukan dengan merujuk ke Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE untuk instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan dan berfokus ke domain bisnis, data dan informasi, layanan, dan aplikasi.
2. Perancangan Arsitektur Enterprise yang mengacu terhadap usaha meningkatkan nilai indeks SPBE Provinsi Jawa Barat untuk dapat mencapai predikat “Sangat Baik” melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Perancangan Arsitektur *Enterprise* menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM dengan fase *Preliminary, Architecture Vision, Arsitektur Bisnis, arsitektur layanan, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, opportunities and solution, dan migration planning*.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan rekomendasi atau masukan terkait perancangan *enterprise architecture* kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan tujuan dan target BAPENDA serta Peraturan Menteri PAN dan RB No.59 Tahun 2020 tentang penyusunan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
2. Memberikan gambaran bagi penulis bagaimana ilmu *enterprise architecture* diterapkan dalam instansi pemerintah.